

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmad Ridwan Tentowi, dkk, *Politik Hukum Tata Kelola Kepelabuhanan Nasional, Studi Kasus Dwelling Time di Tanjung Priok - Jakarta*, Bandung: Warta Bagja, 2016.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ann Seidman, *at.al.*, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, Jakarta: Elips, 2001.
- Azis Syamsuddin, M., *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sekjen DPR RI, 2021.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
-, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
-, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Christino Boyke S.P, *Perencanaan Pelabuhan dan Terminal*, Surabaya: ITS Press, 2019.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, Jakarta: UKI Press, 2021.
-, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Jakarta: UKI Press, 2021.
- Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Felix Wisnu Handoyo dan Bahtiar Rifai, *Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan*, Jakarta: LIPI Press, 2017.
- Fernando M. Manulang, *Hukum dan Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *at.al.*, *Hukum Perundang-undangan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006
- Hariyadi, dkk, *Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan, Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co., 1991.
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Imam Subechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
-, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Junaedi Karso, A., *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kepelabuhanan*, Cirebon: Insania, 2021.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Muchsin Mansyur, *Indonesia Dalam Kerangka Mimpi Besar Negara Maritim, Suatu Kajian Hukum Maritim Sebagai Pengembangan Transportasi Pengangkutan Laut*, Bandung: LoGoz Publishing, 2021.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada*

- Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
-, dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nyoman Budiarta Raka Mandi, *Pelabuhan: Perencanaan dan Perancangan Konstruksi Bangunan Laut dan Pantai*, Denpasar: Buku Arti, 2015.
- Padmo Wahjono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
-, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
-, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Rifqi Qowiyul Iman, *Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum dan Keadilan: Kompilasi Artikel Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rosyid Al Atek, A., *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
-, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
-, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- Yusnani Hasyimzoem, *at.al., Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan *International Convention for the Safety of Life at Sea*.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 982).

C. Jurnal

Abdur Rahim, dkk, *Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 8, Agustus 2023.

Aditiawan Muslim, *Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Dalam Pengelolaan Lahan Kepelabuhanan (Studi Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan)*, Jurnal Fiat Justitia, Volume 10, Issue 2, April-Juni 2016.

Adris A. Putra dan Susati Djalante, *Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Volume. 6, Nomor 1, Januari 2016.

- Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jentera Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Edward Marpaung, *Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional*, Jurnal Warta Perhubungan, Vol. 26, No. 1, Januari, 2014.
- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2., Juni 2022.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007.
- Ias Muhlasin, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qada, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Imam Subechi, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, Nopember 2012.
- Muchsin, *Pemanduan Kapal Dalam Teritorial Laut Menurut Perspektif Kedaulatan Indonesia*, Jurnal Pilar Keadilan, Vol. 1, No. 1, September, Banten: Sekolah Tinggi Hukum Painan, 2021.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Fitriani Ahlan Sjarif, *Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19, Nomor 1, 2022.
- Patartua H. Sitompul, dkk, *Perlindungan Hukum tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayanan Kaitannya Dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Arbiter, 2(2), 2020.
- Puguh Windrawan, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Supermasi Hukum Volume 2, Nomor 1, Juni 2013.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Siyasah, Vol. 4, II, Desember 2021.
- Soediro, *Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatif*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari 2017.
- Sutrisno, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Tata Wijayanti, *Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pailit Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

Tony Prayogo, R., *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 13, No. 02, juni 2016.

Tri Achmadi dan Alwi Sina Khaqiqi, *Model Perhitungan Penerapan Konsesi Pelabuhan di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.

Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Kebalikan Nachtwachterstaat*, *Junral Fiat Justitia*, Vol. 2, No. 5, Mei-Agustus 2012.

D. Makalah, Laporan Kebijakan, Review, Tesis, Disertasi, dan Internet

Achmad Ridwan Tentowi, *Asosiasi Maritim Logistik dan Transportasi Usulkan Reformasi Aturan Kepelabuhan*, www.ekbis.sindonews.com, Posting: Senin, 9 September 2019.

Administrator, *Bagaimana Cara Monitoring Pergerakan Kapal Niaga di Laut*, www.asuransiastra.com, Posting: 15 Desember 2022.

Adveith Nair and Matthew Martin, *Saudi Arabia \$24 Billion in Key Dubai Port Developments*, www.blommborg.com, Posting: 21 Desember 2022.

Ali Safaat, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, 2016.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pengelolaan Pelabuhan Oleh Daerah*, Jakarta: Makalah pada www.bphn.go.id, tanpa tahun.

....., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanpa Tahun.

Bappenas, *Prinsip Keberlanjutan dan Keadilan Untuk Kemaritiman Dalam RPJPN 2025-2014*, www.bappenas.do.id, Posting: 8 Agustus 2023.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Asing Dbolehkan Investasi Dalam Pembangunan Pelabuhan*, www.portal.dephub.go.id, Posting: 22 Februari 2009.

....., *Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, 2020.

Bram Wiyadi, *Pelabuhan Retterdam Perluas Dermaga*, www.logistiknews.id, Posting: 20 Maret 2021.

CNBC Indonesia, *Aktivitas Distribusi Logistik Kapal dan Bongkar Muat Membaik*, www.cnbcindonesia.com, Posting 22 Juli 2021.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Pelabuhan Kuala Tanjung Disiapkan Untuk Menjadi Transshipment Port Indonesia*, www.hubla.dephub.go.id, Posting: 27 September 2022.
- Eunike, *Tracking Kapal Bantu Optimalkan Bisnis Rental Kapal Anda: Ketahui 4 Fungsinya*, www.arvento.id, Posting: 13 Oktober 2023.
- Fakultas Ekonomi dan Bisini Universitas Indonesia, *Pengaruh Investasi Pelabuhan Skala Kecil Berdampak Pada Perekonomian Lokal*, www.feb.ac.id, Posting 2 Februari 2023.
- Hamid S. Attamimi, A., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Jakarta: Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Indonesia-Investments, *Pelabuhan Indonesia II (SOE)*, www.indonesia-investments.com, Posting, 20 September 2023.
- Indonesia.Go.Id, *Peluang Investasi Ramah Lingkungan*, www.indonesia.go.id, Posting: 19 Juli 2019.
- Jalaluddin, *Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, Jurnal Aktualita Vol. 6, No. 3, 2011.
- James Chan, *Investment Strategi: Ways to Invest and Factors to Consider*, www.investopedia.com, Posting: 17 Mei 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta: Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
-, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta 21 November 2005.
-, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Jeremy Bentham, *The History of Utilitarianism*, www.plato.stanford.edu, Posting: 27 Mei 2009.
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, *Kemenkumham Jabar Laksanakan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Daerah Sesuai*

- Visi Negara Pancasila*, www.sippn.menpan.go.id, Posting: 29 Maret 2023.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penafsiran Undang-Undang Dari Perspektif Penyelenggaraan Pemerintah*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, www.ditjenpp.kemenkumham.go.id.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Perlancar Distribusi Logistik Pelabuhan Trisakti, Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Bypass Banjarmasin*, www.pu.go.id., Posting: 27 September 2023.
- Kementerian Perhubungan, *Asing Diperbolehkan Investasi Dalam Pembangunan Pelabuhan*, www.dephub.go.id, Posting: 22 Februari 2009.
-, *Transportasi Laut, Urat Nadi Perekonomian Nasional*, www.dephub.go.id, Posting: 25 Februari 2014.
-, *Menhub Berkomitmen Sederhanakan Proses Perizinan Usaha Kepelabuhanan*, www.dephub.go.id, posting: 22 Februari 2020.
- Khoirur Rizal Lutfi, *Hambatan dan Upaya menciptakan Efisiensi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Manoj Kumar, *Dubai's DP World to Invest \$510 Million in India's Gujarat State*, www.reuters.com, Posting: 25 Agustus 2023.
- Mastorat, *Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi di Kabupaten Bima*, Makassar: Tesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2007.
- Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Perundang-undangan*, *Muhammadiyah Law Review* 2(2), Juli 2018.
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum*. *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Bandung: FH Unpar.
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Padang: Makalah Bahan Orasi Ilmiah Pada Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, 2008.
- Pelindo, *Kuartal I-2023, Pelindo Regional 4 Catat Jumlah Barang Capai 168,24%*, www.pelindo.co.id, Posting 7 Juni 2023.
-, *Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen Dalam Lima Tahun*, www.pelindo.co.id, Posting: 21 September 2023.
- Rais Razali, *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, www.zalirais.wordpress.com, Posting: 12 September 2013.
- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada

Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, 2011.

Saiful Umam, *Mengenal VMS, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di Indonesia*, www.kumparan.com, Posting: 24 September 2019.

Sinar Harapan, *Dubai Akan Investasi Pengembangan Pelabuhan Indonesia US\$7,5 Milyar*, www.sinarharapan.co, Posting: 1 November 2022.

Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Yogyakarta: Makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, tanggal 30- 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM.

Wikipedia, *Port of Singapura*, www.wikipedia.org, Posting: Last Edited 15 November 2023.

